



MENGOMUNIKASIKAN TANTANGAN HIDUP BERSAMA COVID-19

Seri Policy Brief Populi Center, No.4. 17 Agustus 2021

Hartanto Rosojati

Peneliti, Populi Center

rosojati@populicenter.org

Pengantar

Keputusan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) tertanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa SARS-COV-2 atau Coronavirus Disease 19 (COVID-19) merupakan pandemi global. Pernyataan tersebut merujuk pada penyebaran COVID-19 yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Serangkaian kebijakan pun diambil negara-negara terdampak pandemi COVID-19. Disaat beberapa negara dinyatakan berhasil dalam menangani penyebaran virus, kenyataannya di belahan negara lain masih dijumpai ketidakterkendalian kasus penyebaran.

Pada 28 Januari 2021, dalam hasil kajian The Lowy Institute, lembaga think tank yang berbasis di Sidney, Australia, menyajikan data bahwa Selandia Baru menjadi negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 85 dari total 98 negara yang dianalisa dalam penanganan pandemi COVID-19. (Kontan, 28/01/21). Terlepas dari penanganan COVID-19 di Indonesia yang terbilang rendah, WHO pada akhir tahun 2020 sudah menyatakan bahwa dunia akan berhadapan dengan COVID-19 yang akan menjadi endemi (The Guardian, 29/12/20). Artinya, seluruh negara harus menerima kenyataan akan hidup berdampingan dengan COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

Masalah

Dalam menyikapi kasus penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian

serangkaian kebijakan lain seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari mikro, darurat, hingga kebijakan PPKM berlevel 1 sampai dengan 4 menjadi pilihan dalam menekan penyebaran COVID-19.

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan model penyekatan mobilisasi warga dan penutupan beberapa aktivitas ekonomi pada kenyataannya menimbulkan gesekan pada masyarakat lapisan bawah. Meskipun dalam statistik periode pertengahan Juli hingga akhir Juli 2021 kasus positif relatif menurun (covid19.go.id), perjalanan sistem buka tutup pembatasan kegiatan masyarakat tetap saja menimbulkan

“penyekatan mobilisasi warga dan penutupan beberapa aktivitas ekonomi pada kenyataannya menimbulkan gesekan pada masyarakat lapisan bawah.” permasalahan. Beberapa hal yang sering muncul adalah kurang terintegrasinya informasi dalam menerapkan regulasi tersebut. Para petugas di lapangan yang melakukan pembatasan juga tampak masih banyak yang belum memahami aturan PPKM, apalagi masyarakat.

Selain itu, kerancuan arus informasi penerapan kebijakan membatasi upaya pemerintah menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada rentang 23 Januari 2020 hingga 10 Maret 2021, Kominfo sudah mencatat ada 1.470 isu hoax terkait COVID-19 (CNN, 12/03/21).

Analisa

Berdasarkan persoalan di atas, ada satu hal yang harus segera direspon pemerintah terkait dengan menyiapkan tatanan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, yakni persoalan komunikasi. Di tengah pengendalian COVID-19 yang terus gencar dilakukan, baik dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau dengan program vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah perlu memfokuskan pada komunikasi penanganan COVID-19 dengan lebih baik.

Dalam program vaksinasi misalnya, Kominfo juga mencatat bahwa terdapat 105 isu hoax atau kabar bohong terkait dengan vaksin hingga tanggal 10 Februari 2021. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan apabila informasi yang didapat oleh masyarakat adalah informasi yang tidak benar. Sebagai contoh, kabar yang beredar di masyarakat adalah tentang vaksin COVID-19 yang mengandung magnet dengan sejumlah ilustrasi di media sosial yang memperlihatkan uang koin dapat menempel di lengan tepat di titik penyuntikan vaksin COVID-19 (CNN, 28/05/21).

Contoh lain adalah informasi yang menjelaskan bahwa merokok dapat mengurangi resiko tertular COVID-19. Dalam pernyataan yang tercantum pada laman resminya yakni covid.go.id, pemerintah menjelaskan bahwa merokok tidak menghambat seseorang dari bahaya paparan COVID-19. Atau, adanya pernyataan WHO membantah bahwa minuman beralkohol dapat membunuh COVID-19. Pada faktanya menyemprotkan alkohol atau meminumnya tidak akan bisa membunuh COVID-19 (Jawa Pos, 04/09/20).

Serangkaian kabar yang tidak benar tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pada dasarnya membangun kepercayaan masyarakat adalah bagian penting dalam menerapkan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dalam *Trust and the Coronavirus Pandemic* (2020), misalnya, menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang tinggi akan membuat masyarakat menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pada studi yang sama, tingkat kepercayaan yang tinggi di beberapa negara Eropa, tidak lantas membuat negara melakukan kebijakan yang sifatnya koersif, akan tetapi negara melakukan himbuan pada masyarakat agar lebih bertanggung jawab menjaga kesehatan pribadi. Namun sekali lagi hal tersebut dapat tercapai apabila kepercayaan masyarakat tinggi (Devine, et.al, 2020).

Pada kasus di Indonesia, kasus COVID-19 yang masih terbilang cukup tinggi jika dilihat dari worldometers.info pada pertengahan Juli 2021 yang menyentuh angka di atas 50 ribu kasus, juga disinyalir akibat ketidakefektifan kebijakan yang diterapkan pemerintah karena trust level masyarakat rendah. Berdasarkan hasil survei Populi Center pada Oktober 2020, dari 22,8 persen yang menilai buruknya kinerja pemerintah pusat dalam menangani wabah COVID-19, tercatat bahwa yang paling memperburuk kinerja pemerintah adalah penjelasan pemerintah yang selalu berubah-ubah dengan 26,8 persen.

Selain itu, Indonesia yang menurut World Bank peringkatnya diturunkan dari *upper middle income* ke *low middle income* terlihat mengalami kegamangan untuk menetapkan skala prioritas warga mana saja yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam hidup beradaptasi dengan COVID-19. Hal tersebut salah satunya terlihat dari pergantian model kebijakan PSBB hingga PPKM dengan level yang berbeda-beda (Kompas, 22/07/21). Perbedaan skala prioritas dan ketidaktegasan penggunaan istilah penanganan COVID-19, serta kurang terinformasikannya penentuan klasifikasi zona menggunakan warna yang ditetapkan pemerintah tentu dirasa akan menyulitkan masyarakat pada tingkat perekonomian menengah ke bawah untuk memahami situasi yang sebenarnya (The Jakarta Post, 14/01/21; Sidoarjo News, 02/07/21; covid19.go.id).

Persoalan komunikasi pemerintah juga menjadi kritikan dari beberapa media luar negeri yang disinyalir buruk. New York Times dalam *It's too Late* yang diterbitkan pada 28 Mei 2020 menjelaskan bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami penularan COVID-19 yang tidak terkendali akibat pola komunikasi buruk. Meskipun pemerintah sudah menerapkan pembatasan sosial, akan tetapi di saat yang bersamaan pembatasan tersebut harus dilonggarkan untuk menyelamatkan ekonomi. Pada 31 Juli 2020, New York Times juga menyoroti kekacauan informasi yang disampaikan oleh pemerintah, bahkan kali ini yang disoroti adalah peran negatif influencer dalam menyebarkan informasi palsu tentang COVID-19. Salah satu yang digarisbawahi adalah penggunaan kalung berisi ramuan kayu putih untuk menyembuhkan COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (CNN, 20/08/20).

Dalam konteks tersebut, di tengah ketidakstabilan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah tampak mengalami kesulitan menyampaikan pesan dengan basis sains yang konsisten dan kuat secara logis (New York Times, 31/07/20). Ketika pesan yang disampaikan pemerintah tidak lagi memiliki kekuatan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Pakar antropologi

linguistik Amerika, Suzanne Wertheim (2020), menjelaskan bahwa bahasa memiliki posisi yang penting sebagai salah satu alat untuk menghadapi pandemi. Satu dari sekian yang dilihat Wertheim adalah penyampaian pesan kepada publik yang seakan meninggalkan kekuatan utamanya. Pesan seperti, “virus ini menyebar sangat cepat karena kita tidak kompak seperti kata WHO”, yang pernah diucapkan Raisa Broto Asmoro, adalah salah satu pesan yang kehilangan kekuatannya. Pada dasarnya virus tersebut tidak dapat menyebar dengan sendirinya, ia membutuhkan medium sebagai perantaranya, dan dalam hal ini manusia adalah perantara atau subjek yang dimaksud (The Conversation, 23/09/20). Sehingga dengan model kalimat tersebut jelas memiliki kecenderungan mengaburkan manusia sebagai subjek utama yang memiliki tanggungjawab dalam penyebaran virus. Begitu juga yang harus dilakukan

“**Ketika pesan yang disampaikan pemerintah tidak lagi memiliki kekuatan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.**” pemerintah dalam menyampaikan berbagai macam pesan kebijakan terkait dengan hidup berdampingan dengan COVID-19 agar dapat disampaikan dengan lebih lugas dan jelas, serta berbasis saintifik yang valid

Dengan model komunikasi yang baik, dimaksudkan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan secara tidak langsung ketaatan atas kebijakan yang dibuat pemerintah akan lebih tinggi, termasuk dalam membuat dan menyampaikan kebijakan tentang hidup bersama COVID-19.

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menyertakan *chief medical adviser* dan *chief of science* dalam setiap pengumuman informasi, baik dari informasi penanganan COVID-19, atau kebijakan yang akan diterapkan agar lebih mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Selanjutnya agar masyarakat lebih memahami persoalan apabila disampaikan oleh ahli terkait.
2. Pemerintah dalam segala level harus cakap mengomunikasikan krisis dengan gaya bahasa menenangkan berlandaskan *logical reasoning* tentang aturan terkait COVID-19 seperti, efektivitas vaksinasi, mempertahankan protokol kesehatan (prokes) seperti masker, jaga jarak, cuci tangan, pembatasan mobilitas atau yang lainnya untuk menyadarkan masyarakat tentang hidup berdampingan dengan COVID-19.
3. Kanal informasi atau pusat informasi harus terpusat dan diperjelas agar menjadi rujukan bagi semua pihak, baik di media massa, social media, atau media lain. Selain itu selalu diinfokan kepada publik informasi terkait data, penanganan, dan apa yang dilakukan pemerintah. Hal ini agar masyarakat tidak terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang sumbernya tidak jelas untuk menghindari disinformasi.
4. Gaya komunikasi yang perlu dilakukan adalah model *crisis communication*, yakni setidaknya mencakup penyampaian informasi tentang data sekaligus tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

5. Pemerintah atau negara sebagai otoritas tertinggi dalam mengomunikasikan kebijakan juga perlu melakukan *counters issues* secara lebih masif atas informasi-informasi yang tidak jelas di masyarakat.
6. Dalam setiap informasi yang ingin disampaikan, pemerintah perlu menghindari kepentingan politis. Hal yang perlu dilakukan dalam setiap penyampaian kebijakan untuk hidup bersama COVID-19 adalah mengedepankan landasan ilmiah agar masyarakat lebih dapat menerima.
7. Apabila Satuan Gugus Tugas (Satgas) COVID-19 diberikan kewenangan sebagai clearing house informasi tentang pandemi, maka harus memakai gaya komunikasi yang lebih gencar dan sistematis untuk melawan pihak berseberangan dengan upaya protokol kesehatan.
8. Dalam hal komunikasi publik, Satgas COVID-19 perlu untuk memiliki tim teknis Teknologi Informasi untuk mengomunikasikan langkah-langkah Satgas COVID-19 dalam menangani pandemic yang lebih *user friendly* yang berbasis data akurat, sekaligus mengintegrasikan data di level lokal dan pusat.
9. Pemerintah perlu membangun infrastruktur komunikasi untuk mendorong literasi medis masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami konteks informasi terkait dengan medis, kesehatan, virus, agar terhindar dari informasi yang tidak benar.
10. Komunikasi yang dilakukan pemerintah atau tindakan yang dilakukan perlu diarahkan pada penanganan secara periodik dan komprehensif dari awal hingga terkini, dan tidak terbatas pada data-data yang cenderung membingungkan masyarakat.
11. Pola komunikasi pusat ke daerah bukan berbasis sanksi atau hukuman, tapi lebih kepada motivasi, kesiapan pendampingan dan penganggaran, agar daerah percaya diri dalam beradaptasi hidup bersama COVID-19.
12. Koordinasi penyampaian informasi antara pusat dan daerah harus seragam namun memberikan diskresi lebih luas pada pemerintah lokal untuk menentukan pendekatan terbaik mengatasi situasi COVID-19 dan periode setelahnya.

Referensi

CNN Indonesia, 20 Agustus 2020. Ragam Kritik Media Asing ke Jokowi Tangani Corona.

<<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200820102303-106-537607/ragam-kritik-media-asing-ke-jokowi-tangani-corona>>.

CNN Indonesia, 12 Maret 2021. Ada 1.470 Hoax COVID-19 Hingga Maret, Terbanyak di Facebook.

<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>>.

CNN Indonesia, 28 Mei 2021. Kominfo: Vaksin COVID-19 Mengandung Magnet Hoax.
<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210528191019-192-648070/kominfo-vaksin-covid-19-mengandung-magnet-hoax>>.

Devine, Daniel. et, al. 20 Juli 2020. Trust and The Coronavirus Pandemic: What are the Consequences of and for Trust? An Early Review of the Literature. *Political Studies Review*, 1-12.

IEEE, 16 April 2020. Language Choices in Times of Crisis: Wordsmithing our Response to COVID-19.
<<https://procomm.ieee.org/language-choices-in-times-of-crisis-wordsmithing-our-response-to-covid-19/>>.

Jawa Pos, 4 September 2020. Ketahui 6 Informasi Hoax dan Fakta yang Sering Beredar Selama Pandemi.
<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210528191019-192-648070/kominfo-vaksin-covid-19-mengandung-magnet-hoax>>.

Kompas, 22 Juli 2021. Seputar PPKM Level 4 Sebagai Perpanjangan PPKM Darurat.
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/06490121/seputar-ppkm-level-4-sebagai-perpanjangan-ppkm-darurat?page=all>>.

Kontan, 28 Januari 2021. Selandia Baru Negara Terbaik Tangani Pandemi COVID-19, Indoneisa peringkat berapa?
<<https://internasional.kontan.co.id/news/selandia-baru-negara-terbaik-tangani-pandemi-covid-19-indonesia-peringkat-berapa>>.

New York Times, 31 Juli 2020. In Indonesia, False Virus Cures Pushed by Those Who Should Know Better.
<<https://www.nytimes.com/2020/07/31/world/asia/indonesia-coronavirus.html>>.

Sidoarjo News, 2 Juli 2021. Sosiolog : Gonta-ganti Nama Kebijakan di Masa Pandemi Bikin Masyarakat Semakin Bingung.
<<https://sidoarjonews.id/sosiolog-gonta-ganti-nama-kebijakan-di-masa-pandemi-bikin-masyarakat-semakin-bingung/>>.

The Conversation, 23 September 2020. Tiga Cara Pemerintah Dapat Memperbaiki Bahasa dan Memperkuat Pesan Terkait COVID-19.
<<https://theconversation.com/tiga-cara-pemerintah-dapat-memperbaiki-bahasa-dan-memperkuat-pesan-terkait-covid-19-146207>>.

The Guardian, 29 Desember 2020. WHO Warns COVID-19 Pandemic Is Not Necessarily The Big One.
<<https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one>>.

The Jakarta Post, 14 Januari 2021. What You Need to Know about Indonesia's Newest COVID-19 Restrictions.

<<https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/14/what-you-need-to-know-about-indonesias-newest-covid-19-restrictions.html>>.

Populi Center | info@populicenter.org
Jl. Mampang Prapatan VIII No. 38, Jakarta Selatan 12790